

Konsep Kepemimpinan Daulah Islamiah di Irak dan Suriah (Analisis Hegemoni Antonio Gramsci 1891-1937 M)

Ali makhsun
C1011006
Program Studi Sastra Arab
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: 208628@gmail.com

Penelitian ini memperlihatkan proses berdirinya sebuah kepemimpinan Daulah Islamiah di Irak dan Suriah. Serta menganalisis konsep kepemimpinan Daulah Islamiah di Irak dan Suriah. Data dan sumber data diperoleh melalui studi pustaka. Metode penelitian menggunakan penjabaran teori Antonio Gramsci tentang hegemoni sebagai perspektif adanya gerakan ISIS, yaitu sebuah hegemoni hanya dapat diraih dengan mengubah kesadaran, pola berfikir dan pemahaman masyarakat, konsepsi mereka tentang dunia, serta norma perilaku moral masyarakat. Sehingga dari tataran hegemoni ini dapat disimpulkan proses berdirinya kepemimpinan Daulah Islamiah dari embrio pergerakan Al-Qaeda pimpinan Abu Mush'ab Az-Zarqawi yang pernah berafiliasi di Afghanistan. konsep kepemimpinan Daulah Islamiah adalah upaya legitimasi dan dominasi terhadap pemerintahan dan masyarakat Irak dan Suriah dengan cara revolusi dan demokrasi. Upaya memperluas wilayah atau menimbulkan ancaman bagi negara lain bergantung pada pilihan dan kemampuan mereka untuk memahami dunia tentang Daulah Islamiah.

Kata kunci: hegemoni, Daulah Islamiah, dan kepemimpinan..

1. PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang dihebohkan dengan munculnya gerakan yang menginginkan sebuah Negara Islam. Irak dan Suriah menjadi pusat atau daerah yang sudah diklaim sebagai basis pergerakan ini. Keadaan Iraq dan Suriah dengan kehadiran Islamic State Iraq dan Syiria (ISIS) dianggap sebagai salah satu fenomena masyarakat budaya yang ingin menampilkan sebuah eksistensi bermasyarakat. Ide-ide tentang Negara islam selalu dikumandangkan untuk menarik masyarakat menghadirkan Negara yang aman, tentram dan sejahtera. ISIS sekarang dibawah pimpinan Abu Bakr Al-Baghdadi. Dalam kepemimpinanya, Abu Bakar Al-Baghdadi menyampaikan keinginanya menjadikan irak dan suriah sebagai Negara islam. Gagasan ISIS mendirikan Daulah Islamiah dipandang menjadi sebuah obsesi penguasa, untuk wujud kebudayaan melalui ide mendirikan negara Islam dan selanjutnya pada tahap realisasi. Melalui penyampaian ide itu, kelompok ISIS berupaya menyampaikan

gagasan sehingga mampu mendominasi yang memberikan pada kelompok penguasa legitimasi untuk berkuasa (Sugiono, 1999: 19).

Ideologi Daulah Islamiah yang ditawarkan kelompok ISIS dipandang menjadi sebuah wujud kebudayaan yang menarik untuk diteliti. Nilai kepemimpinan Daulah Islamiah menurut ISIS dipandang mampu membentuk tata kelola bernegara yang baik dan mampu menstabilkan keadaan masyarakat akan menarik untuk diteliti secara seksama untuk mengetahui proses yang diharapkan. Sudut pandang yang digunakan adalah hegemoni cetusan Antonio Gramsci, memperlihatkan fenomena kebudayaan ini keterkaitan antara ekonomi, Negara dan rakyat. Teori hegemoni mampu melihat presisi pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam control sosial politik dan mampu melihat pengaruh cultural antara Negara dan rakyat (Sulasman, 2013: 206).

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini mendapati rumusan masalah dalam beberapa pertanyaan berikut: pertama, Bagaimana latar belakang munculnya sebuah kepemimpinan *Daulah Islamiah* di Irak dan Suriah?. Kedua, Bagaimana konsep kepemimpinan *Daulah Islamiah* di Irak dan Suriah?.

Penelitian secara umum mendeskripsikan tentang latar belakang kemunculan *Daulah Islamiah* di Irak dan Suriah dan mengetahui latar belakang kemunculannya. Peneliti Menganalisis konsep kepemimpinan *Daulah Islamiah* di Irak dan Suriah, lebih khusus secara penyampaian ideologi serta tahapan-tahapan merealisasikan dominasi melalui ideologinya.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, dan Paradigma yang akan digunakan untuk meneliti obyek tentang kelompok ISIS yakni teori hegemoni dicetuskan oleh Antonio Gramsci. Teori ini dipandang mampu membedah ideologi dan kepentingan kelompok ini. Simon (2001: 19-20) menyatakan bahwa titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni berkaitan dengan adanya suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas yang ada di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan mempertimbangkan kepemimpinan politik dan ideologis.

2. PEMBAHASAN

A. Sejarah *Daulah Islamiah di Irak dan Suriah*

Bermula dari invasi Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara pendukung (Sekutu) ke Irak di tahun 2003. Ketika itu Irak masih dibawah kendali Saddam Husain. Hingga akhirnya pemerintahan Saddam Husain mampu digulingkan, dan AS berusaha membuat pemerintahan baru untuk menjalankan kepemimpinan di Irak. Pemerintahan yang berbasis Syiah membuat Masyarakat Irak yang mayoritas Sunni menolak. Hal ini membuat rakyat Irak bangkit dan berjuang membebaskan diri dari penjajahan AS beserta pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan dan membentuk kerjasama antar faksi mujahid. Al-Qaeda, Taliban dan Zarqawi yang memimpin kelompok Tauhid wa Jihad menjadi jaringan yang paling kuat dalam melawan invasi dan bergabung mengganti nama menjadi al-Qaeda fi biladil Rafidhain (Assad, 2014: 94).

Abū Mush'ab Az-Zarqawī (bahasa Arab: أبو مصعب الزرقاوي) adalah pemimpin kelompok militan Islam Al Qaeda di Irak pada awal kemunculannya. Perjuangan mengusir Uni Soviet di Afghanistan bersama Al-Qaeda adalah pengalaman pertama berhadapan langsung sebagai sarana jihadnya. Sejak itulah ia selalu bertempur dengan semua yang dianggap sebagai musuh Islam. Pada tanggal 29 Maret 1994, Zarqawi masuk penjara karena mencoba melawan pemerintah Yordania yang dianggap Thoghut dengan mendirikan organisasi "*jama'ah at-tauhid*" kemudian berganti nama menjadi "*ba'iatul imam*" yang bertujuan mendirikan Negara Islam di bawah konsep kepemimpinan khilafah (Assad, 2014: 90).

Setelah Zarqawi tewas, *Abu Umar al-Baghdadi* (lihat gambar 3) menjadi tokoh sentral para mujahidin yang kala itu sudah terbentuk dengan nama *Majelis Syuro Mujahidin*. Ia menjadi pemimpin Organisasi yang telah dibentuk sebelumnya oleh Zarqawi. Hingga, pada 13 Oktober 2006 *majelis syuro mujahidin* berubah menjadi ISI. *Abu Umar al-Baghdadi* dinobatkan sebagai khalifah ISI karena dianggap sebagai tokoh yang berkrisma dan pantas menduduki kursi kekhalifahan. Pada 18 April 2010, *Abu Umar al-Baghdadi* dilaporkan tewas akibat serangan gabungan AS dan Pemerintah Irak di barat daya dari Tikrit (Assad, 2014: 98-100).

Abu Bakr Al-Baghdadi dan kelompoknya bergabung dengan *Dewan Syuro Mujahidin* (DSM) pada tahun 2006, di mana ia menjabat sebagai anggota komite syariah DSM. Setelah mengubah nama DSM sebagai Negara Islam Irak (ISI) pada tahun 2006, al-Baghdadi menjadi pengawas umum komite syariah ISI dan anggota dari kelompok dewan konsultatif senior (Haidar, 2014: 97). Pada tanggal 29 Juni 2014, ISIS mengumumkan pembentukan khilafah, al-

Baghdadi sebagai khalifah, atau lebih dikenal sebagai Khalifah Ibrahim, dan Negara Islam Irak dan Suriah ini berganti nama menjadi Negara Islam (IS)

Pola pengorganisasian yang digunakan sebenarnya sangat beragam. Namun, dapat dikelompokkan menjadi dua pola. *Pertama*, ISIS akan memanfaatkan para tokoh masyarakat untuk merepresentasikan kelompok ini sebagai basis jihad. ISIS akan memanfaatkan kelas sosial atau sel-sel independen sebagai representasi gerakan ini untuk kepentingan bersama. *Kedua*, memanfaatkan kelompok-kelompok yang terdapat di setiap Negara untuk berbaiat kepada ISIS. Kelompok yang bergabung harus Menyatakan sumpah setia dan menyatukan visi dengan nilai-nilai keislaman melawan barat dan sekutunya.

Pada 29 Juni 2014 bertepatan dengan 1 Ramadhan 1435 H, melalui media resmi ISIS mendeklarasikan wilayah yang mampu dikuasai bertepatan dengan pengangkatan Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi. Adapun wilayah kekuasaan yang diklaim meliputi 16 wilayah yakni di Irak meliputi Baghdad, Anbar, Diyala, Kirkuk, Salah al-Din, Ninawa, dan Babil. Sedangkan untuk wilayah Suriah meliputi al-Barakah, al-Kheir, Raqqa, al-Nadiya, Halab, Idlib, Hama, Latakia, dan Damaskus (Roggio, 2006: 8).

B. Konsep Daulah Islamiah

Secara umum Daulah Islamiah masih mengikuti metode pengangkatan khalifah seperti *ijma'* ulama, berdasarkan pengangkatan khalifah Umar bin Khatab dan Abu Bakr As-Shidiq pada masa khulafaur rasyidin. Secara literatur pengangkatan khalifah dalam Islam ada 2 cara, yaitu : pemilihan (al-ikhtiyar) dan penunjukan (al-'ahd) yang mewajibkan pembentukan *Ahlu Halli wa 'Aqdi* untuk memilih seorang imam yang pada dirinya memenuhi persyaratan yang harus dimiliki seorang imam (Anshari, 2007: 45)

Gramsci mengembangkan konsep kepemimpinan untuk menggambarkan suatu kondisi di mana supremasi kelompok sosial dicapai tidak hanya melalui dominasi atau pemerintah tetapi juga melalui persetujuan atas dasar sukarela dari kelas yang didominasi (Litowitz, 2000:515). Struktur pemerintahan yang terdapat dalam pemerintahan Islam setidaknya terdapat delapan bagian, yaitu : Khalifah, Mu'awin Tafwidh, Mu'awin Tanfiz, Amir Jihad, Wullat, Qadhi atau Qadha, ihad Idari dan Majlis Ummat.

Keyakinan tegaknya *Daulah Islamiah* menjadi solusi supaya tegaknya keadilan dimuka bumi. Semenjak kehancuran khilafah Islamiah pada tahun 1924 maka memperjuangkan kembali kehadirannya menjadi kewajiban bersama yang harus diyakini. Tidak mungkin suatu prinsip

ideologi bisa tegak diatas landasnya kecuali melalui keyakinan kuat dibarengi dengan tindakan keras (Mahmud,Dkk, 2009: 64).

C. Upaya Legitimasi Daulah Islamiah di Irak dan Suriah

Daulah Islamiah tidak dapat dibentuk kecuali melalui jama'ah yang dikumpulkan oleh al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, yang bersih dari sikap ekstrem Murji'ah dan Khawarij. Tujuan terpenting jama'ah ini adalah untuk menghidupkan kembali tauhid terutama dalam masalah yang banyak diabaikan dan ditinggalkan oleh gerakan-gerakan islam yaitu masalah yang berhubungan dengan al-wala' wal bara', hukum, dan tasyri' (legislasi) (Haidar, 2007: 89).

Ambisi Az-Zarqawi untuk menyatukan para mujahid dalam membentuk kekhalifahan islam dibawah kepemimpinanya mulai terdapat titik terang pada tahun 2006. Majelis Syura Mujahidin terbentuk sebagai wadah persatuan para mujahid di Irak. Faksi jihad di Irak meleburkan diri masuk ke dalam majelis ini antara lain : *Al-Qaeda Irak, Jaish ath-Thaifah al-Manshurah, saraya anshar tauhid, saraya jihar islami, saraya al-Ghuraba, Kataib al-Ahwal dan turut bergabung yakni Jaisy Ahlu Sunah wal Jamaah dan kataub al-Murabithin* (Said, 2014 : 95).

Sejak dideklarasikan melalui audio oleh Amir *Abu Bakar Al-Baghdadi, Daulah Islamiah Irak dan Syam (Islamic State of Iraq and Sham)* langsung menarik perhatian banyak kalangan. Jabhah An-Nushrah (JN) berafiliasi di Suriah menyatakan bergabung dengan kelompok ISIS. Deklarasi tersebut berisi pernyataan Al-Baghdadi yang menggabungkan antara *Daulah Islamiah* Irak dan Jabhah An-Nushrah pada April lalu, ISIS bertujuan mengembalikan *Khilafah* dan tidak sekedar mendirikan *Daulah Islamiah* di Suriah; ISIS juga berhasil sebagai daya tarik mujahidin asing dari berbagai negara untuk bergabung ke Suriah yang diwadahi dalam *Katibah Muhajirin*; ISIS berhasil mencatat beberapa kemenangan besarnya terutama sebagai aktor utama dalam merebut Pangkalan Militer Minakh di Provinsi Aleppo pada Agustus lalu; dan yang terpenting adalah ISIS telah mengambil pelajaran dari kesalahannya di Irak dan berhasil merebut hati dan pikiran penduduk setempat (Mustarom, Syamina 2014 edisi XIII: 82).

Diantara kelebihan ISIS dibandingkan dengan fraksi-fraksi perlawanan lain adalah besarnya daya tarik dan dukungan internasional terhadapnya. Pendukung besar ISIS adalah berasal dari Arab Saudi, Somalia, Libanon, Ahwaz (Iran), dan Sinai (Mesir). Selain negara-negara tersebut bukan berarti bahwa negara-negara lain tidak ada yang mendukung ISIS. *Anshar*

Syariah di Libya dan Tunisia, Tahrek Taliban El-Pakistani, serta Eropa tampaknya juga banyak yang bergabung dengan ISIS di bawah *Katibah Al-Muhajirin*. Saat ini setidaknya ISIS telah menguasai, mengontrol, menyediakan kebutuhan mendasar, melaksanakan pendidikan sederhana, dan menjalankan dakwah di beberapa wilayah, diantaranya: *Jarabulus* (Provinsi *Aleppo*), *Dana* (Provinsi *Idlib*), *Raqqah*, *Ghauthah*, *Syarqiyah*, *Azaz*, dan tempat-tempat lainnya (Mustarom, Syamina 2014 edisi XIV : 10-12).

D. Bentuk Dominasi Kepemimpinan *Daulah Islamiah*

Pertama, mengangkat status *Daulah Khilafah* serta khalifah Abu Bakr al-Baghdadi. Pengumuman ini menjadikan ISIS dipandang sebagai sebuah kelompok yang mampu memenuhi aspirasi para aktivis Islam di saat kelompok-kelompok jihad lainnya. Sekarang, ISIS menjadi salah satu opsi yang mampu bersaing meski kelompok jihadis lainnya menganggap bahwa proyek khilafah yang mereka lakukan terlalu premature. *Kedua*, deklarasi ISIS tersebut berusaha untuk menahan perdebatan di kalangan jihadis tentang legitimasi keagamaan atas tindakan yang mereka lakukan (Mahmud Dkk, 2009: 167). *Ketiga*, kelompok-kelompok jihad lainnya (misalnya, Taliban di Afghanistan dan Asy-Syabab di Somalia) berhasil mendapatkan kontrol wilayah yang cukup besar, namun gagal untuk maju ke arah tujuan sebuah negara yang benar-benar Islam yang tidak terkekang dengan sistem demokrasi ala Barat. Kegagalan untuk memobilisasi umat Islam membuat keuntungan yang mereka dapatkan dipandang berbalik (Mustarom, Syamina 2014 edisi XI : 13). *Keempat*, dan yang paling penting, pengumuman ini merupakan bagian dari rencana untuk memobilisasi umat Muslim. Dengan mengumumkan sebuah kekhalifahan, ISIS berharap untuk menarik lebih banyak relawan, prajurit dan profesional yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan terus berjuang bersama membangun negara dan pemerintahan (Yanuana, 2014: 2).

Keberhasilan ISIS menguasai beberapa wilayah di Irak dan Suriah, yang kemudian diikuti dengan deklarasi khilafah menyisakan beberapa bentuk radikal di kalangan intelektual. Tantangan ini dilakukan karena adanya krisis hegemoni, berikut adalah bentuk krisis *Daulah Islamiah* di Irak dan Suriah yang memaksa melakukan hegemoni dengan radikal :

Pertama, masa depan ISIS sangat bergantung pada kemampuan para pejuangnya untuk terus melanjutkan penaklukan yang telah mereka lakukan dalam beberapa bulan belakangan ini. Jika pemerintah Irak mampu merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh *Daulah Islamiah*, atau bahkan jika pertempuran di Irak menemui kebuntuan, legitimasi atas seluruh usaha ISIS akan dipertanyakan. *Kedua*, ancaman adanya resistensi yang sangat serius dalam usaha mereka untuk

mengimplementasikan visi kekhalifahannya (Sugito, 2010 : 78). *Ketiga*, mungkin tidak hanya muslim biasa yang akan menentang, kelompok militan lain mungkin juga akan melawan mereka. *Keempat*, Deklarasi ini akan semakin memperpanjang perselisihan antara ISIS dan Al-Qaidah.

Saat ini, ISIS memiliki keuntungan momentum, uang tunai, dan musuh yang mengalami disfungsi. Tapi ini masih awal, dan masih banyak yang harus dilihat bagaimana ISIS menghadapi tantangan ini. Mereka harus memutuskan seberapa jauh mereka mau berkompromi dan bernegosiasi untuk membangun aliansi yang kuat atau bentuk radikal sebagai solusi menghegemonikan Daulah Islamiah. Mereka harus merekrut dan mengalokasikan baik sumber daya keuangan dan personil untuk mengelola wilayah yang mereka kuasai. Kemampuan ISIS untuk memperluas wilayah atau menimbulkan ancaman bagi negara lain sangat bergantung pada pilihan dan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan ini, untuk mencapai hegemoni nyata untuk tatanan dunia.

3. PENUTUP

Gagasan kepemimpinan Daulah Islamiah dipandang menjadi sebuah obsesi penguasa untuk wujud kebudayaan melalui ide mendirikan negara Islam dan selanjutnya pada tahap realisasi. Al-Qaeda yang menjadi embrio awal pasti memberikan atau meninggalkan ide-ide negara Islam ke dalam organisasi ISIS. Menciptakan hegemoni baru hanya dapat diraih dengan mengubah kesadaran, pola berfikir dan pemahaman masyarakat, konsepsi mereka tentang dunia, serta norma perilaku moral masyarakat. Untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan sistem sosial yang dianggap sudah rusak, maka umat Islam harus kembali ke asal. Dengan hal ini, maka rezim kekuasaan harus direbut, yang dilanjutkan dengan menciptakan sistem pemerintahan kekhalifahan (Daulah Islamiah), seperti yang dilakukan oleh generasi Salaf, dan setelah itu mendirikan negara Islam atau Daulah Islamiah. Artinya kader-kader pilihan harus melakukan jihad di bidang sosial dan politik untuk mencapainya.

Sistem Daulah Islamiah yang berusaha disebarkan di Irak dan Suriah lebih didasarkan pada bentuk sarana untuk mengelola atau mengatasi konflik, salah satu contohnya adalah dengan melakukan penyatuan faksi secara bertahap. Meski demikian, penting dicatat bahwa Daulah Islamiah juga menggunakan kekuatan paksaan sebagai kebijakan kedua jika praktik hegemoni gagal dilakukan. Hal ini dicapai ketika ideologi yang dipromosikan secara sukarela diasimilasi oleh masyarakat itu sendiri. Kemenangan ISIS dan deklarasi khilafah yang mereka lakukan telah menimbulkan alarm dan ironi yang menempatkan mereka pada tantangan yang sama dengan

pemerintahan yang mereka gulingkan. Peperangan dalam dekade ini telah memberi bukti bahwa proklamasi di Irak tidak menjamin kesuksesan. Kemampuan ISIS untuk memperluas wilayah atau menimbulkan ancaman bagi negara lain sangat bergantung pada pilihan dan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan ini, serta menciptakan hegemoni yang lebih baik

Daftar Pustaka

- Anshari.Isa. 2007.*Deklarasi Daulah Islam Irak*. Solo: Media Islamika.
- Assad, Muhammad Haidar. 2014. *ISIS :Organisasi Teroris Paling Mengerikan Abad Ini*. Jakarta Selatan : Zahira,
- Haidar, Nasir. 2007. *Gerakan Islam Syari'ah*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Harun, Hermanto, 2001. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Bandung: Refika aditama
- Litowitz, Douglas. 2000. "Gramsci, Hegemony, and Law" jurnal *Brigham Young University Review*. Vol 2000 No:2 (2000) p.515.<http://lawreview.byu.edu/archives/2000/2/lit.pdf> (diakses 25 April 2012)
- Mahmud, Husain. dkk .2009. *Megaprojek Kedua Al-Qaeda*. Kafayah , Klaten
- Mustarom.2013.*Al-Qaeda : Memenangkan Hati dan Pikiran*.Syamina Lapsus IV edisi Agustus.
- 2014. *Tanggapan Ulama Terhadap Serangan Koalisi Internasional AtasDaulah Khilafah*.Syamina Lapsus XIV edisi Oktober
- 2014. *Takdir Daulah Khilafah :Pro-Kontra Pembentukan Sebuah Negara Baru*.Syamina Lapsus XIII edisi Agustus.
- Roggio, Bill.2006. "The Rump Islamic Emirate of Iraq 2006. The long war"
. http://www.longwarjournal.org/archives/2006/10/the_rump_islamic_emi.php
- Said, Ali As'ad. 2014. *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik,Ideologi dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiono. 1999. *Metode Penelitian Budaya*. Jakarta: Alfabet
- Sugito. 2010. *Konflik Etnis Dalam Masa Transisi Demokrasi Di Irak*. Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, 20 Oktober .
- Sulasman dan Setia, Gumilar. 2013. *Teori-Teori Kebudayaan. Dari Teori hingga Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yanuana, Ahmad Samantho. 2014. *Sejarah ISIS dan ILLUMINATI*. Jakarta: Ufuk.